

ABSTRAK

Pembahasan dalam penelitian ini membahas permasalahan tentang bentuk perbuatan kartel yang dilakukan oleh para Terlapor dalam Putusan KPPU Nomor : 15/KPPU-I/2019. Permasalahan lainnya adalah mengenai pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus Perkara Nomor : 15/KPPU-I/2019. Perkara kartel yang tertuang dalam Putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-I/2019 yang dilakukan bersama oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi. Terlapor diduga telah melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menaikkan harga tiket pesawat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU hanya merupakan lembaga administratif, sehingga KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata. Majelis KPPU juga telah memutuskan pelaku usaha bersalah, namun Majelis KPPU tidak menjatuhkan sanksi apapun atas kesalahan pelaku usaha. Tidak adanya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kartel dapat membuat pelaku mengulangi perbuatannya dan dalam hal ini konsumen akan dirugikan kembali.

Kata Kunci: KPPU, Kartel, Persaingan Usaha

ABSTRACT

The discussion in this study discusses the problem of the form of cartel actions carried out by the Reported Parties in the KPPU's Decision Number: 15/KPPU-I/2019. Another problem is the consideration of the Commission Council in deciding Case Number: 15/KPPU-I/2019. The case regarding the cartel contained in the KPPU's Decision Number: 15/KPPU-I/2019 which was carried out jointly by PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, and PT Wings Abadi. The Reported Parties are alleged to have violated the provisions of Article 5 and Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition by increasing the price of airline tickets. The data collection technique in this research is using the library research method. While the analysis technique carried out on the legal materials that have been collected by the author will be done deductively. The results of the study indicate that KPPU is only an administrative institution, so that KPPU can only impose administrative sanctions and is not authorized to impose criminal sanctions or civil sanctions. The KPPU Assembly has also decided that the business actors are guilty, but the KPPU Assembly has not imposed any sanctions on the mistakes of the business actors. The absence of sanctions imposed on cartel actors can make the perpetrators repeat their actions and in this case consumers will be harmed again.

Keywords: *KPPU, Cartel, Business Competition*